

Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Ahsani Paramita

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government spending on the education sector and per capita income on poverty rates in South Sulawesi Province. Data were obtained from the Central Statistics Agency of South Sulawesi for the period 2008-2022. This study used quantitative research with the Path Analysis method. The results show that directly the variables of government spending in the education sector and per capita income have an effect on PAD, life expectancy has no effect on PAD. Then, the variables of government spending in the education sector, life expectancy have no effect on poverty, while per capita income has a significant effect on poverty. Indirectly, the variables of government spending in the education sector and UHH on poverty through PAD are more dominant in reducing poverty rates, while the total effect of the per capita income variable on poverty through PAD is lower than the indirect effect through PAD in South Sulawesi Province.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan dan pendapatan perkapita terhadap angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2008-2022. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode Path Analysis. Hasil menunjukkan bahwa secara langsung variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap PAD, umur harapan hidup tidak berpengaruh terhadap PAD. Kemudian, variabel pengeluaran pemerintah sektot pendidikan, umur harapan hidup tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara tidak langsung, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan UHH terhadap kemiskinan melalui PAD lebih dominan menurunkan angka kemiskinan sedangkan pengaruh total variabel pendapatan per kapita terhadap kemiskinan melalui PAD lebih rendah dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui PAD di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keywords:

government expenditure; government revenue; poverty rate

* Corresponding Author at Department of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Religious Institute Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 East Java, Indonesia.
E-mail address: habibmaherudin@gmail.com, lenysepfianszah@gmail.com, lilin2407pancawati@gmail.com, thoha.ainun@iainponorogo.ac.id

1. Introduction

Permasalahan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan permasalahan di tingkat nasional yaitu permasalahan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok maupun keluarga sehingga kondisi tersebut rentan terhadap munculnya permasalahan sosial lainnya. Penanggulangan permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, sebagai penunjang dalam proses peningkatan taraf hidup masyarakat miskin (Iwang dkk., 2023).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami sedikit penurunan. Dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 792,65 ribu jiwa, lalu menurun pada tahun 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa. Kemudian meningkat pada tahun 2020 hingga 2021 yang mungkin salah satunya disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mewabah. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Lalu kembali menurun pada tahun 2022 senilai 777,44 ribu jiwa. Hal tersebut memberikan tanda yang menarik perhatian bahwa pola penanganan yang dikeluarkan dalam strategi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif pada penurunan angka kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kualitas SDM. Pendidikan merupakan faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan, karena kemiskinan dan pendidikan mempunyai keterkaitan yang sangat besar, yang mana pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk berkembang lewat pemahaman dan penguasaan ilmu dan juga keterampilan (Juardi dkk., 2023). Pendidikan yang gagal akan menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran, kriminalitas yang akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Pendidikan bisa dikatakan sebagai investasi sumber daya untuk mendapatkan return di masa yang akan datang atau bisa disebut sebagai investasi jangka panjang. Isroviyah (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga akan terhindar dari kemiskinan.

Faktor lain yang mampu menekan angka kemiskinan yaitu pendapatan per kapita. Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu wilayah pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian nilai PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Rahimah & Chandriyanti, 2020). Pendapatan per kapita umumnya dianggap sebuah hal yang menandakan hidup layak dan menggunakan semua variabel yang menggambarkan aspek-aspek dari kesejahteraan, namun tidak merepresentasikan harapan hidup dan melek huruf. Meskipun pendapatan per kapita

tidak menggambarkan aspek yang lebih luas dari kesejahteraan seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia, namun pendapatan per kapita merupakan hal yang sangat penting dalam perbaikan pembangunan manusia (Laili, 2018).

Tabel 1. Angka Kemiskinan Dibandingkan Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Perkapita, serta Umur Harapan Hidup di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Pendapatan Pemerintah (Rp)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Umur Harapan Hidup (Tahun)
2018	792,63	9.444.559.008,00	2.512.759.946.877,00	35.340.003,69	70,08
2019	767,80	9.631.039.543,00	2.541.512.623.792,00	37.573.541,74	70,43
2020	776,83	10.374.681.400,00	2.697.872.827.039,00	36.166.225,22	70,57
2021	784,98	10.397.863.771,00	2.868.375.647.496,00	37.572.542,74	70,66
2022	777,44	10.421.551.543,00	2.843.079.306.635,00	39.115.984,86	70,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Jika pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, umur harapan hidup, pendapatan per kapita dan penerimaan pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka tingkat produktifitas masyarakat juga semakin baik sehingga menekan angka kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, umur harapan hidup, pendapatan per kapita dan penerimaan pemerintah yang semakin meningkat juga dibarengi dengan peningkatan kemiskinan yang tidak menurun secara konsisten. Hal tersebut yang menurut peneliti harus diteliti lebih dalam lagi.

2. Literature Review

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan atau kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk sandang pangan dan papan. Kemiskinan bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia yang beragam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dapat dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan pengetahuan, aset, keterampilan, serta organisasi sosial politik. Sedangkan aspek sekunder melihat kemiskinan dari kepemilikan sumber-sumber keuangan, jaringan sosial dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut dapat dilihat dalam bentuk kekurangan air, gizi, perawatan kesehatan yang kurang baik, perumahan yang sehat, dan tingkat pendidikan yang rendah (Asrianti, 2018).

Pendapatan Pemerintah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Paramita, A. (2024) Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Pusat dan Daerah.). Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan (Muhammad & Mangkuwinata, 2014).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Syam, 2014).

Umur Harapan Hidup

Salah satu indikator untuk melihat kesehatan disuatu wilayah dapat dilihat dari umur harapan hidup di wilayah tersebut. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili umur harapan hidup saat lahir. Umur panjang merupakan hal yang seharga dan terdapat berbagai macam faktor yang berpengaruh dengan harapan hidup secara tidak langsung seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik (Auria, 2021).

Pendapatan Per Kapita

Menurut Kuncoro (2004), pendapatan per kapita merupakan indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada periode tertentu. Besarnya pendapatan per kapita sering digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran di berbagai daerah. Pendapatan per kapita dapat diperoleh dari tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut (Widiarsana & Aswitaro, 1999).

3. Method, Data, and Analysis

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan tiga variabel bebas (independent) yaitu sektor pendidikan, umur harapan hidup dan pendapatan per kapita, sedangkan variabel bebas (dependent) yaitu kemiskinan dan pendapatan pemerintah yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan studi deskriptif dengan menggabungkan beberapa penelitian untuk dijadikan informasi dan kemudian menguji teori dan mengoptimalkan pernyataan tentang bagaimana keadaan terbaru dari subjek eksplorasi (Kuncoro, 2009).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dihimpun dari instansi atau pun lembaga yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengunduh dan mengambil hasil dan laporan dari anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, umur harapan hidup, pendapatan per kapita, kemiskinan dan pendapatan pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan Periode tahun 2008-2022.

Paramita, A. (2024) Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Metode Analisis Data

Data yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan alat analisis jalur (*Path Analysis*). Dengan menggunakan analisis jalur, peneliti dapat menemukan jalur paling tepat dan singkat untuk variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y) yang diformulasikan dan untuk melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, umur harapan hidup dan pendapatan per kapita terhadap kemiskinan melalui pendapatan pemerintah. Data yang digunakan dalam variabel-variabel terbatas yakni hanya periode 2008-2022. Untuk mengatur pengaruh antara variabel yang digunakan ada beberapa langkah pengujian yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

4. Result and Discussion

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis terletak antara $0^{\circ}12'$ dan 8° LU serta $116^{\circ}48'$ BT, dengan luas wilayah $46.717,48 \text{ km}^2$ serta memiliki beragam bahasa dan suku mulai dari Makassar, Bugis, Toraja, Mandar dan lainnya yang menyebar di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 21 kabupaten dan 3 kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas $46.717,48 \text{ km}^2$ atau 16,06 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, terdapat 310 kecamatan dan 3051 desa/kelurahan di antara 24 Kabupaten/Kota tersebut. Kota Parepare yang memiliki luas $99,33 \text{ km}^2$ merupakan Kabupaten/Kota dengan luas wilayah terbawah yaitu 0,21 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa garis histogram mengikuti dan mendekati kurva yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Selain itu, kurang bervariasi dan dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya mean yang lebih besar dari standar deviasi ($0,846 < 6,05$). Selanjutnya, uji multikoleniaritas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF semua variabel bebas dan variabel intervening dalam penelitian ini < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas dan layak digunakan.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot. Terlihat titik-titik tersebar secara acak dan tidak berbentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan. Sedangkan, uji autokorelasi menunjukkan nilai runs test sebesar

0.602 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelesi karena nilai signifikan (asymptotic sig) berada di atas 0,05.

2. Uji Regresi Linear

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS yaitu analisis linear berganda, maka model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 17,224 + 5,507 X_1 - 26,154 X_2 - 56,583 X_3 + e_1$$

1. Nilai konstanta (α) adalah sebesar 17,72 yang artinya apabila pengeluaran sektor pendidikan (X_1), umur harapan hidup (X_2), dan pendapatan per kapita (X_3) tidak berubah atau konstan, maka PAD (Y) mengalami peningkatan sebesar 1,72 .
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran sektor pendidikan (X_1) sebesar 5,50. koefisien yang bernilai positif artinya pengaruh yang searah antara variabel pendidikan (X_1) dan PAD (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika pendidikan (X_1) mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan PAD (Y) sebesar 5,50, dengan asumsi bahwa variabel umur harapan hidup (X_2) dan pendapatan per kapita (X_3) bersifat tetap (konstan).
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel umur harapan hidup (X_2) sebesar -26,15. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi pengaruh antara variabel umur harapan hidup (X_2) dan PAD (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika umur harapan hidup (X_2) mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan PAD (Y) sebesar -26,15, dengan asumsi bahwa variabel pendidikan (X_1) dan pendapatan per kapita (X_3) bersifat tetap (konstan).
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendapatan per kapita (X_3) sebesar -56,58. Koefisien yang bernilai negatif artinya terjadi pengaruh antara variabel pendapatan per kapita (X_3) dan PAD (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika pendapatan per kapita (X_3) mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan PAD (Y) sebesar -56,58, dengan asumsi bahwa variabel pendidikan (X_1) dan umur harapan hidup (X_2) bersifat tetap (konstan)

3. Koefisien Determinasi

Hasil hitungan uji R^2 diperoleh pengaruh pengeluaran sektor pendidikan (X_1), umur harapan hidup (X_2) dan pendapatan per kapita (X_3) terhadap PAD (Y_1) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,507. Artinya kontribusi variabel pendidikan (X_1), umur harapan hidup (X_2) dan pendapatan per kapita (X_3) terhadap PAD (Y)

adalah sebesar 50,02% dan sisanya 49,08% adalah kontribusi dari variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

4. Uji Hipotesis

Hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) menunjukkan nilai probabilitas F- statistik sebesar $0,044 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel dependen dipengaruhi secara simultan. Sedangkan uji parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Variabel Pengeluaran sektor pendidikan (X_1) (0,042)

Variabel pengeluaran sektor pendidikan (X_1) terhadap PAD (Y) memiliki probabilitas $0,042 < 0,05$ dan nilai t-hitung $0,552 < t\text{-tabel } 2,262$ yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

b. Variabel Umur harapan hidup (X_2) (0,119)

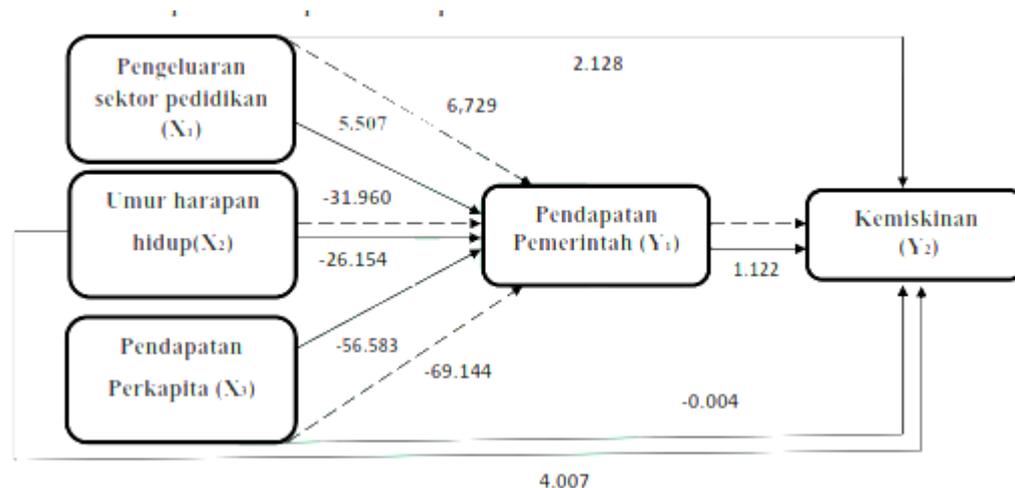
Variabel umur harapan hidup (X_2) terhadap PAD (Y) memiliki probabilitas $0,0015 < 0,05$ dan nilai t-hitung $-1,692 < t\text{-tabel } 2,262$ yang menunjukkan bahwa umur harapan hidup tidak berpengaruh dan negatif terhadap PAD. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

c. Variabel Pendapatan Perkapita X_3 (0,010)

Variabel pendapatan per kapita (X_3) terhadap PAD (Y) memiliki probabilitas $0,010 < 0,05$ dan nilai t-hitung $-0,039 < 2,262$ t-tabel yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima

5. Path Analysis

Hasil analisis jalur menunjukkan hasil sebagai berikut:



5. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut. pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh langsung terhadap PAD yang artinya semakin besar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan maka akan meningkatkan PAD, karena dengan kualitas pendidikan yang baik maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pendapatan per kapita berpengaruh terhadap PAD dengan demikian, peningkatan PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Reference

- Abid Muhtarom. (2016). Analisis Pendidikan Terhadap PAD di Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2014. I(June), 1-10.
- Adon, M. J., & Jeraman, G. T. (2023). Masyarakat Madani. 8(1), 1-20.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(1), 60-71. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1548>.
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010, X, 158-169.
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48-54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>.
- Amelia, F., Nurtati, & Meidona, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pariaman. Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi STIE Sumatra Barat Pariaman, Vol. 2(2), 116-125. <https://123dok.com/document/zg8lde6y-analisis-pengeluaran-pemerintahpendidikan-kesehatan-pertumbuhan-kemiskinanpembangunan.html%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/39279/>.

Paramita, A. (2024) Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan di Sulawesi Selatan

- Andiny, P., & Sari, M. G. P. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2(2), 116–125. <http://scholar.unand.ac.id/39279/>.
- Andiyana, P. I. (2019). Pengaruh Sektor Basis, Tingkat Pendidikan dan Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Provinsi Maluku Utara Pada Tahun 2011-2018). Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49784/1/PUTRI IRIANTI ANDIYANA-FEB.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49784/1/PUTRI%20IRIANTI%20ANDIYANA-FEB.pdf).
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Skripsi, 51(1), 51.
- Astawa, & Budhi. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk Yang Bekerja, Inflasi Terhadap PAD Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 11(11),
- Auria, I. (2021). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tenaga Kerja, dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Azizah, E. W., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.
- Badan pusat Statistik (2022). Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik
- Bado, B., Alam, S., & Cahyani, A. (2019). The Effect Of Government Admission On Poverty In The City Of Makassar: 2000-2017. 75(ICMEMM 2018), 219–222. <https://doi.org/10.2991/icmemm-18.2019.26>.
- I Made Cahyadi Putra Kusuma, I. K. G. B. (2023). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. 1, 4059–4081.
- Islami Nadia, & Anis Ali. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939–948.
- Iwang, B., Rizlan, A. N., & T, I. (2023). Poverty In West Sulawesi; Analysis Of Education Level And Investment Through Economic Growth. *EcceS (Economics Social and Development Studies)*, 10(1), 90–114. <https://doi.org/10.24252/ecc.v10i1.37197>.
- Jayanti, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita. July, 1–23.
- Juardi, Ahmad, M. A. A., & Iwang, B. (2023). Analisis Jumlah Penduduk , Tingkat Pendidikan , PDRB , dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi
- yam, S. F. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ipm terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan.
- Tauri, Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. 1–86.
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sofyan, M. N. F. (2021). Dampak Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Antar Kabupaten Jawa Barat. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 131–141. <https://doi.org/10.35590/jeb.v8i2.3474>.